

BAB I

PENDAHULUAN

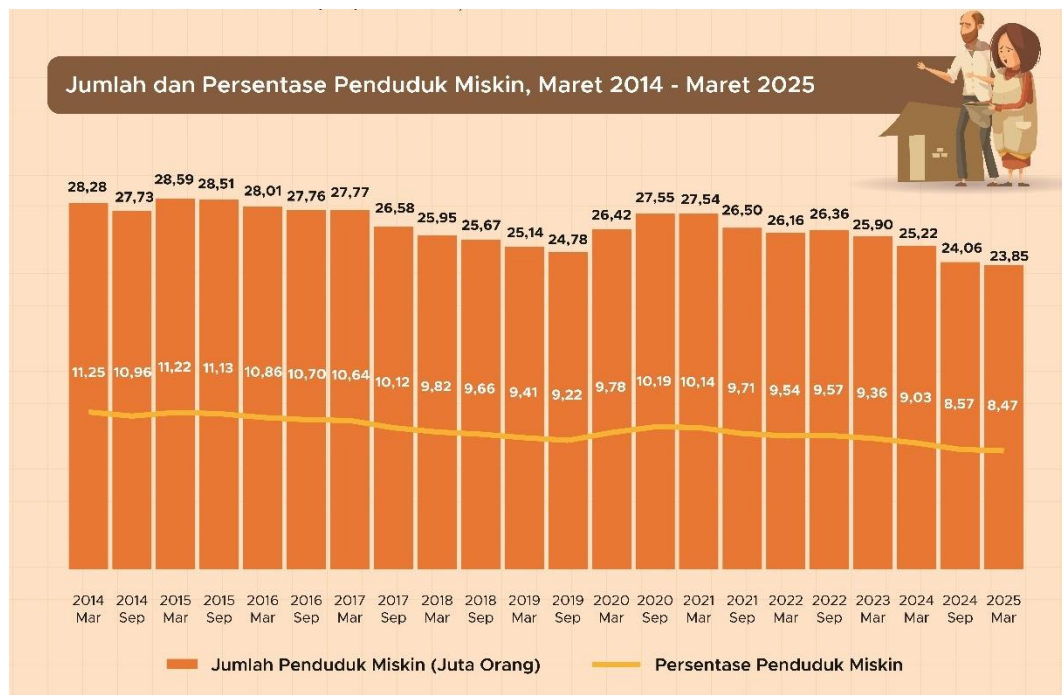
A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi pembahasan yang selalu menjadi pembicaraan negara di dunia. Penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan akhir sebuah negara. Menjadi miskin berarti seseorang memiliki pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kehidupan sehari-harinya menjadi perjuangan yang terus-menerus. (Sinurat, 2023)

Tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2025) pada bulan Maret 2025, masih terdapat 8,47% dari 23,85 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, menurut tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau *cost of basic needs*. Garis kemiskinan senilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan selain makanan.

Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi gizi dan kebutuhan dasar lainnya. Pada catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, mereka yang memiliki pengeluaran dibawah Rp 595.242 per kapita per bulan masuk kedalam kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan di perkotaan pada bulan September 2024 senilai Rp 615.763 sedangkan di perdesaan ialah senilai Rp 566.655 (Rachman, 2025).

Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan menjadi masalah besar karena kemiskinan dapat memicu sejumlah tantangan lainnya (Fadila & Marwan, 2020). Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial dan ekonomi yang harus terus diperangi. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, realitasnya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, baik ditingkat nasional maupun global.



*Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2014-
Maret 2025 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Gambar 1.1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin pada bulan Maret 2014 sampai dengan Maret 2025. Data tersebut memberikan informasi bahwa adanya penurunan angka kemiskinan di Maret 2025. Akan tetapi, kemiskinan di Indonesia sempat mengalami kenaikan pada Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 dan kembali menurun pada September 2021. Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2020 disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga Indonesia mengalami penurunan pendapatan dan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Muliarta (2021) ditemukan hasil bahwa Covid-19 berdampak kepada peningkatan kemiskinan di Indonesia.

Secara kumulatif, ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh solid diangka 5,3% secara kumulatif dan selalu berada di atas 5% pada tiap kuartalnya, hal ini didukung dengan efektivitasnya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan inflasi yang terkendali.

Walaupun pandemi Covid-19 masih menimbulkan berbagai tantangan, namun melalui kerja keras dan penerapan kebijakan yang tepat, Indonesia telah bergerak menuju pemulihan ekonomi yang lebih baik. Dapat dilihat pada laporan Badan Pusat Statistik bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah berhasil ditekan hingga mencapai 8,47% pada Maret 2025.

Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi yang masih terlihat jelas perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayahnya. Beberapa provinsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sementara provinsi lainnya masih berjuang menghadapi keterbatasan sumber daya dan kesempatan ekonomi.

Ditingkat provinsi, kondisi kemiskinan memperlihatkan variasi yang cukup besar. Misalnya, provinsi-provinsi di wilayah Jawa dan Sumatera umumnya memiliki angka kemiskinan rendah dibandingkan wilayah Indonesia bagian timur. Namun di beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin secara absolut masih tinggi karena padatnya populasi.

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah
(Persen), 2025

38 Provinsi	Jumlah	38 Provinsi	Jumlah
Aceh	12,33	Kalimantan Barat	6,16
Sumatera Utara	7,36	Kalimantan Tengah	5,19
Sumatera Barat	5,35	Kalimantan Selatan	3,84
Riau	6,16	Kalimantan Timur	5,17
Jambi	7,19	Kalimantan Utara	5,54
Sumatera Selatan	10,15	Sulawesi Utara	6,71
Bengkulu	12,08	Sulawesi Tengan	10,92
Lampung	10,00	Sulawesi Selatan	7,60
Kep. Bangka Belitung	5,00	Sulawesi Tenggara	10,54
Kep. Riau	4,44	Gorontalo	13,24
DKI Jakarta	4,28	Sulawesi Barat	10,41
Jawa Barat	7,02	Maluku	15,38

38 Provinsi	Jumlah	38 Provinsi	Jumlah
Jawa Tengah	9,48	Maluku Utara	5,81
DI Yogyakarta	10,23	Papua Barat	20,66
Jawa Timur	9,50	Papua Barat Daya	17,95
Banten	5,63	Papua	19,16
Bali	3,72	Papua Selatan	19,71
Nusa Tenggara Barat	11,78	Papua tengah	28,90
Nusa Tenggara Timur	18,60	Papua Pegunungan	30,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga permasalahan kemiskinan di wilayah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap angka kemiskinan nasional. Di provinsi Jawa Barat, angka kemiskinan mengalami penurunan yaitu dari September 2024 sebanya 3,67 juta orang miskin menjadi 3,65 juta orang dengan presentase 7,02% dari populasi penduduk. Namun, indikator kedalaman kemiskinan (P1) naik dari 1,05 menjadi 1,17. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang meningkat dari 0,24 menjadi 0,29.

Meskipun secara presentase tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi karena besarnya jumlah populasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren positif setelah masa pandemi Covid-19. Upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam proses pemulihan tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program dan juga sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari provinsi Jawa Barat juga menghadapi tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun daerah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor

pertanian, perdagangan, maupun industri kecil dan menengah, namun tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata di seluruh wilayah.

Tabel 1. 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2019	381.372	217.64	9.94
2020	393.452	247.94	11.24
2021	404.635	271.02	12.30
2022	416.914	266.10	12.01
2023	451.853	249.18	11.20
2024	475.046	245.92	11
2025	491.604	229.64	10.23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun jika dilihat angka penurunannya masih berjalan lambat dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Jawa Barat.

Pada tabel 1.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 ada kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kemiskinan tersebut mencapai 11,24% atau 247,94 ribu penduduk miskin. Angka tersebut masih naik hingga tahun 2021 dimana kemiskinan mencapai 12,30% atau 271,02 ribu penduduk miskin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mengurangi angka kemiskinan, antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, peningkatan keterampilan kerja, serta pengembangan potensi ekonomi lokal seperti industri kreatif dan UMKM.

Program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun penurunan berjalan lambat, akan tetapi Kabupaten Cirebon berhasil untuk keluar dari miskin ekstrim. Pada tahun 2022, Kabupaten

Cirebon berada di angka 12,01% atau 266,10 ribu jiwa penduduk miskin, kemudian angka ini turun pada tahun 2023 yaitu 11,20% atau 249,18 ribu jiwa penduduk miskin, tahun 2024 yaitu 11% atau 245,92 ribu jiwa penduduk miskin dan data terbaru pada tahun 2025 yaitu 10,23% atau 229,64 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Cirebon.

Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 sebesar per kapita per bulan Rp. 491.604 sementara pada tahun 2024 sebesar Rp 475.046 per kapita per bulan atau naik sebesar 3,49%. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cirebon terjadi peningkatan dari 1,69 pada tahun 2024 menjadi 1,79 pada tahun 2025. Ini menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cirebon terjadi peningkatan dari 0,36 pada tahun 2024 menjadi 0,47 pada tahun 2025. Ini menunjukkan ketimpangan (gap) pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri semakin membesar.

Dalam konteks Islam, kemiskinan dianggap sebagai masalah yang harus diatasi melalui kerja sama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain yang membutuhkan, terutama orang miskin. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, *"Dan berinfaqlah (dengan harta) yang kamu miliki, maka Allah akan meninggikan kamu dengan derajat yang tinggi."* (QS. Al-Baqarah: 195)

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada pemberdayaan moral dan spiritual masyarakat. Prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), serta distribusi kekayaan yang merata menjadi landasan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat terus menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, baik dari aspek kebijakan publik, ekonomi daerah, maupun kesejahteraan sosial. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti efektivitas program-program pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, sebagian besar kajian masih terbatas pada analisis kuantitatif dan belum banyak mengkaji aspek nilai dan prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, banyak penelitian sebelumnya berfokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi atau pada wilayah perkotaan besar, sedangkan kajian di tingkat kabupaten seperti Kabupaten Cirebon masih jarang dilakukan secara mendalam. Padahal, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas, di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan informal, serta memiliki latar belakang religius yang kuat. Kondisi ini menarik untuk dikaji dari perspektif ekonomi Islam, terutama dalam melihat sejauh mana nilai-nilai seperti *keadilan distributif*, *tolong-menolong (ta'awun)*, dan *tanggung jawab sosial pemerintah (mas'uliyah)* diimplementasikan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, *research gap* yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah masih minimnya penelitian yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dengan pendekatan ekonomi Islam, belum banyak penelitian yang menyoroti implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon, dan kurangnya penelitian yang menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan harus diarahkan untuk mengembangkan program-program yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti zakat, sedekah, dan infak. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi perspektif ekonomi Islam dalam konteks peran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah kabupaten Cirebon. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap formulasi kebijakan berbasis syariah yang lebih efektif dalam membangun masyarakat sejahtera.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dengan mengambil sebuah judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan; Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Cirebon)”**.

B. Identifikasi Masalah

Kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih menjadi persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan struktural. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan, namun permasalahan ini belum sepenuhnya terselesaikan karena memiliki akar yang mendalam dan saling berkaitan. Berikut adalah identifikasi masalah kemiskinan di Kabupaten Cirebon:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat

Sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Rendahnya keterampilan juga membatasi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau mengembangkan usaha produktif.

2. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional

Sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Cirebon bekerja di sektor pertanian, khususnya sebagai buruh tani dengan pendapatan tidak

tetap. Pola pertanian yang masih tradisional, bergantung pada musim, serta terbatasnya akses terhadap teknologi dan modal menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat.

3. Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal

Lapangan kerja formal di Kabupaten Cirebon masih terbatas, sehingga banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Kondisi ini semakin memperbesar kesenjangan antara kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

4. Kesenjangan pembangunan antarwilayah

Pembangunan di Kabupaten Cirebon belum merata. Wilayah perkotaan seperti Sumber dan sekitarnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pedesaan di bagian timur dan selatan kabupaten. Ketimpangan ini berdampak pada perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

5. Kurangnya akses terhadap modal dan pembiayaan usaha

Banyak masyarakat miskin, terutama pelaku UMKM dan petani kecil, mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha karena keterbatasan jaminan dan akses terhadap lembaga keuangan. Hal ini menghambat pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

6. Kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum optimal

Akses jalan, sarana transportasi, air bersih, serta fasilitas kesehatan di beberapa wilayah pedesaan masih kurang memadai. Kondisi ini memperlambat distribusi hasil produksi dan menurunkan produktivitas masyarakat miskin.

7. Rendahnya kesadaran ekonomi dan manajemen keuangan keluarga

Sebagian masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keuangan, investasi, atau tabungan produktif. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh sering tidak diatur dengan baik dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

8. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah

Pandemi telah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama sektor perdagangan, pertanian, dan industri kecil. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Cirebon bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan pembangunan, serta lemahnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari fokus pembahasan, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh instansi/dinas terkait. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek pembangunan daerah, melainkan berfokus pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, dan kurangnya akses terhadap modal dan pembiayaan usaha.

Selain itu, penelitian ini juga meninjau peran tersebut dari perspektif ekonomi Islam, dengan menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Cirebon, serta tidak mencakup evaluasi terhadap seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya batasan ini, diharapkan pembahasan menjadi lebih fokus dan mendalam dalam menggambarkan bagaimana peran pemerintah

daerah Kabupaten Cirebon dalam mengatasi kemiskinan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya mengatasi kemiskinan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program-program tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap program dan efektivitas program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis program pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya mengatasi kemiskinan.
- b. Menganalisis efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
- c. Menganalisis tinjauan ekonomi Islam terhadap program dan efektivitas program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis itu sendiri, maupun bagi pihak lain yang terkait. Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan ekonomi pembangunan daerah.
- 2) Menambah wawasan dan literatur mengenai peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan yang dikaji melalui perspektif ekonomi Islam.
- 3) Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara kebijakan publik dan nilai-nilai Islam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
- 2) Menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai Islam.
- 4) Menjadi sumber referensi praktis bagi akademisi, mahasiswa, maupun lembaga pendidikan dalam mengembangkan kajian dan penelitian sejenis di masa mendatang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena kemiskinan dan peran pemerintah daerah secara mendalam melalui pandangan, pengalaman, dan kebijakan dari pihak yang

terlibat. Sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual di lapangan, termasuk program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon serta efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kebijakan daerah, seperti nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih secara purposive karena wilayah ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di Jawa Barat, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain itu, Cirebon juga memiliki karakter sosial religius yang kuat, sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif ekonomi Islam.

Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni 2025 sampai dengan Agustus 2025. Dimulai dari proses pengumpulan data hingga analisis, sesuai dengan jadwal penelitian yang telah disusun oleh peneliti.

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Harimawan data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. (Junaidi, 2019)

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti:

- 1) Pejabat Pemerintah Daerah seperti Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

- 2) Tokoh masyarakat dan Ahli Ekonomi Islam yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- 3) Masyarakat penerima manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah contohnya laporan dan data statistik BPS.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Teknik ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan pada jumlah responden.

Kriteria informan ditetapkan berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian, yaitu peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Cirebon serta ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:

a. Pihak Pemerintah Daerah

Pejabat atau staf dari instansi terkait, seperti:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, sebagai yang memiliki program langsung terkait pengentasan kemiskinan.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai penyusun strategi pembangunan daerah dan kebijakan pengurangan kemiskinan.

- 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon, yang memiliki kontribusi langsung dalam kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari perspektif ekonomi Islam.

b. Ahli Ekonomi Islam

Tokoh masyarakat, akademisi, atau ulama yang memahami kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Cirebon serta mampu memberikan pandangan dari perspektif ekonomi Islam mengenai kebijakan pemerintah.

c. Masyarakat Penerima Manfaat/Bantuan

Masyarakat yang menjadi sasaran atau penerima manfaat dari program-program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau pelatihan keterampilan.

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 12 informan diantaranya ada 3 dari pemerintah daerah, 2 ahli ekonomi dan 7 dari masyarakat penerima manfaat/bantuan. Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan kepada 12 narasumber diantaranya 3 dari pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah, dan Badan Amil Zakat Nasional, 2 dari ahli ekonomi islam yang merupakan akademisi, dan 7 narasumber dari penerima manfaat/bantuan.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah bersama Ibu Eva Rachmah. Kedua dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 bertempat di ruangan dosen pasca sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bersama Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag sebagai ahli ekonomi Islam. Wawancara ketiga, dilakukan pada tanggal 24 Mei 2025 di Desa Luwung, Mundu bersama Ibu Ayas Wastirah sebagai

masyarakat penerima manfaat/bantuan. Keempat, pada tanggal 12 Juni 2025 bertempat di Dinas Sosial bersama Ibu Lesy Herawati sebagai perwakilan dari Dinas Sosial. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2025 bertempat di BMT Islamic Center Tuparev bersama Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag. sebagai ahli ekonomi Islam. Dilanjut pada tanggal 19 Juni 2025 bertempat di desa Lurah, Plumbon melakukan wawancara kepada 5 narasumber sebagai penerima manfaat/bantuan diantaranya Ibu Ina, Ibu Saena, Ibu Yuniah, Ibu Tursini, dan Ibu Turina. Terakhir wawancara dilakukan di Desa Tukmudal, Sumber bersama Ibu Lilis Fatmawati pada tanggal 23 Juni 2025 sebagai penerima manfaat.

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan oleh peneliti secara langsung di Kabupaten Cirebon untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kebijakan dan program yang telah dirancang oleh pemerintah benar-benar diimplementasikan di lapangan dan sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan observasi dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan, seperti desa penerima manfaat/bantuan. Peneliti juga mengamati kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendapatan, akses pendidikan, dan kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, beberapa program pemerintah daerah seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta dukungan zakat produktif dari BAZNAS mulai

menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.

Observasi ini membantu peneliti untuk memahami secara langsung kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan realitas pelaksanaannya, serta menjadi dasar dalam melakukan analisis efektivitas program pemerintah dari perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui observasi memberikan kontribusi penting dalam memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi antara lain:

- 1) Laporan resmi dari instansi pemerintah
- 2) Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS)
- 3) Dokumen dari BAZNAS Kabupaten Cirebon
- 4) Peraturan daerah, pedoman kerja, dan kebijakan pemerintah
- 5) Foto, brosur, serta catatan lapangan

Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperkuat data hasil wawancara dan observasi dengan bukti-bukti tertulis dan visual. Selain itu, dokumentasi juga membantu dalam menguji keabsahan data serta memberikan gambaran faktual dan historis mengenai bagaimana pemerintah daerah bersama lembaga mitra seperti BAZNAS menjalankan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya data dokumentasi yang lengkap, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif

dan objektif terkait peran serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dari perspektif ekonomi Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses *reduction data display* dan *verification*. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) Miles dan Huberman mengemukakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, setelah data penelitian yang diperoleh dilapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih.
2. *Data Display* (Penyajian Data) penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan *display data* dalam penelitian ini dengan menyajikan data melalui ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah direduksi.
3. *Conclussing Drawing* (Penarikan Kesimpulan) verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam proses ini, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 15 untuk mengorganisasikan hasil wawancara dan menampilkan tema-tema utama secara sistematis, sehingga analisis menjadi lebih objektif dan transparan.

6. Keabsahan Data

Setelah penulis selesai mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya adalah menguji kepercayaan data atau menggabungkan data

(triangulasi data), dengan kata lain triangulasi adalah melakukan pengujian kebenaran data dan cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik atau metode berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ialah digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara menguji dan mengecek data dapat dilakukan dengan menggunakan waktu tertentu melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang berisi fenomena, peta permasalahan serta urgensi penelitian. Selain itu, terdapat persoalan penelitian dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dan juga membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan, metode pengumpulan dan analisis data, objek penelitian, dan sumber data yang akan digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas mengenai landasan teori dengan mengutip penelitian terdahulu dengan teori yang relevan sesuai topik yang dibahas, merumuskan hipotesis dan membuat model penelitian atau kerangka penelitian.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai objek dari penelitian yang akan dilakukan seperti lokasi penelitian, dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam dan menjelaskan implikasinya. Hasil penelitian memuat data utama, penunjang dan pelengkap termasuk dengan uraian pembahasan, pengujian hipotesis yang telah dilakukan serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini penulis menyimpulkan atas pengujian hipotesis dan diskusi singkat atas hasil yang diperoleh. Penulis juga mencantumkan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.